



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera**

MPR / DPR - RI, Gd. Nusantara I, Jl. Jend. Gatot Soebroto, Jakarta 10270
Telp. (021) 575 6087 - 575 6088 - 575 6090, Fax. (021) 575 6086 Website : www.fraksi.pks.id



**PENDAPAT MINI
FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera (FPKS)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
ATAS
17 (TUJUH BELAS) RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG**

**KABUPATEN BINTAN, KABUPATEN LAMPUNG SELATAN, KABUPATEN
LAMPUNG TENGAH, KABUPATEN LAMPUNG UTARA, KABUPATEN BATANG
HARI, KABUPATEN KERINCI, KABUPATEN MERANGIN, KOTA JAMBI,
KABUPATEN BENGKALIS, KABUPATEN INDRAGIRI HULU, KABUPATEN
KAMPAR, KOTA PEKANBARU, KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, KABUPATEN
AGAM, KABUPATEN PADANG PARIAMAN, KABUPATEN PASAMAN, DAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

=====

Disampaikan Oleh : Hj. LEDIA HANIFA AMALIAH, S.Si., M.PSi.T.
Anggota Nomor : A-427

***Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh
Salam Sejahtera untuk kita semua***

Yang kami hormati:

- **Pimpinan dan Anggota Baleg DPR RI;**
- **Rekan-rekan wartawan serta hadirin yang kami muliakan.**

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, yang telah memberikan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita, sehingga sampai saat ini kita masih dapat hadir dalam Rapat Paripurna. Shalawat dan salam tak lupa kita sampaikan pada Rasulullah Muhammad *Shollallahu 'Alaihi Wasallam*, insan yang telah mengajarkan kepada kita tentang hakikat keadilan yang harus ditegakkan demi membangun masyarakat yang sejahtera.

Pimpinan dan Anggota Dewan serta hadirin yang kami hormati,

Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan terkait 17 (tujuh belas) Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Bintan, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Batang Hari, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, Kota Jambi, Kabupaten Bengkulu, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman, dan Kabupaten Pesisir Selatan:

Pertama, FPKS sepakat pengaturan pada 17 (tujuh belas) Kabupaten/Kota tersebut **menekankan pada penegasan alas hukum, batas wilayah, serta karakteristik wilayah, suku bangsa dan budaya.**

Kedua, FPKS berharap agar **pengelolaan dan pengembangan potensi daerah mempertimbangkan karakteristik wilayah** dari 17 (tujuh belas) Kabupaten/Kota tersebut. Bagi Kabupaten/Kota yang memiliki wilayah pesisir dan kepulauan harus memiliki prioritas pembangunan di bidang kelautan dan perikanan. Bagi Kabupaten/Kota yang memiliki karakteristik wilayah dataran rendah dan pegunungan yang memiliki tanah yang subur harus memprioritaskan pembangunan di bidang pertanian dan perkebunan. Bagi Kabupaten/Kota yang memiliki potensi sumber daya alam harus memprioritaskan pengelolaan yang mempertimbangkan kelestarian lingkungan dan pengelolaan yang berkelanjutan.

Ketiga, FPKS berharap bahwa 17 (tujuh belas) RUU tentang Kabupaten/Kota tersebut tetap **mempertimbangkan aspek kesejarahan, keberagaman masyarakat, baik keberagaman suku, agama, dan ras serta antar golongan.**

Keempat, Fraksi PKS DPR RI meminta kepada pemerintah agar terus mengawal kinerja pemerintah daerah khususnya netralitas aparatur sipil di tengah tengah pelaksanaan Pemilu 2024. **Pastikan unsur-unsur pemerintah daerah menjunjung tinggi netralitas lembaga negara agar Pemilu 2024 berlangsung dengan damai, aman, dan tertib.**

Pimpinan dan Anggota Dewan serta hadirin yang kami hormati,

Menimbang beberapa hal yang sudah kami paparkan di atas, kami Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dengan Mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim* Menyatakan **Menyetujui** 17 (tujuh belas) Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Bintan, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Batang Hari, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, Kota Jambi, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman, dan Kabupaten Pesisir Selatan untuk dilanjutkan prosesnya ke tahap berikutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian pendapat mini Fraksi PKS ini kami sampaikan, sebagai ikhtiar dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh Warga Negara Indonesia. Semoga Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk memberikan kerja terbaik bagi bangsa dan negara Indonesia.

Atas perhatian Pimpinan dan Anggota Dewan serta hadirin semua kami ucapkan terima kasih.

Billahi taufiq wal hidayah

Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

Jakarta, 6 Rajab 1445 H

18 Januari 2024 M

**PIMPINAN
FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

Ketua,

Sekretaris,



The image shows two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is for the Chairman, and the signature on the right is for the Secretary. In the background, there is a circular logo for the PKS Fraksi, featuring a yellow sun and crescent moon, with the text 'PARTAI Keadilan Sejahtera' and 'PKS' around it. Below the signatures, the names and titles of the signatories are printed.

DR. H. Jazuli Juwaini, MA.

A-449

Hj. Ledia Hanifa, A. S.Si. M.Psi. T.

A-427